

Lampiran 6 Surat Sekretaris Jenderal KPU RI  
 Nomor : 760/SJ/VII/2017  
 Tanggal : 6 Juli 2017

## RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017

Nama/Unit Organisasi : KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 Tahun : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Perkiraan Biaya	Pelaksana
					T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/ Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres/ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	100%	Publikasi Informasi Pemilu			Mg.IV		Rp. 73.556.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Teknis</li> <li>• Bagian Teknis dan Hupmas</li> </ul>
				Rumah Pintar Pemilu (RPP)		Mg.II		Rp. 222.300.000		
				Bimbingan Teknis Kepemiluan	Mg.IV		Mg.IV	Rp. 65.829.000		
		Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres/ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	75%	Kegiatan Partisipasi Masyarakat		Mg.I			Rp. 32.908.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Teknis</li> <li>• Bagian Teknis dan Hupmas</li> </ul>
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	Mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih		Mg.II		Rp. 35.604.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Perencanaan dan Data</li> <li>• Bagian Program dan Data</li> </ul>	
2	Terlaksananya Pemilu Legislatif dan Pilpres/ Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang Aman, Damai Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan tanpa konflik	98%	Layanan Administrasi Kepemiluan		Mg.III	Mg.III	Mg.III	Rp. 41.851.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Hukum</li> <li>• Bagian Hukum</li> </ul>
				Sosialisasi Penyuluhan UU Pemilu			Mg.IV	Mg.IV		
		Persentase Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan	1%	Advokasi dan Sengketa Hukum	Mg.II					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Hukum</li> <li>• Bagian Hukum</li> </ul>
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	96%	Advokasi dan Sengketa Hukum	Mg.II					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Hukum</li> <li>• Bagian Hukum</li> </ul>

3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Persentase Pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggara Pemilu dan Nilai Akuntabilitas Kinerja	0,1%	SPIP		Mg.IV		Rp. 17.150.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Hukum</li> <li>• Bagian Hukum</li> </ul>
		Persentase Opini BPK Atas LHP	WTP	Review Laporan Keuangan	Mg.IV		Mg.IV	Rp. 24.196.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Keuangan, Umum dan Logistik</li> <li>• Bagian Keuangan, Umum dan Logistik</li> </ul>
		Indeks Reformasi Birokrasi	66%	Pembentukan Tim Agen Reformasi Birokrasi	Mg.II			-	Sekretariat KPU Prov. Sulteng

Palu, 3 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Lampiran 1 Surat Sekretaris Jenderal KPU RI  
 Nomor : 760/SJ/VII/2017  
 Tanggal : 6 Juli 2017

**TABEL PEMANTAUAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2017  
 KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (Bulan Januari s/d Maret)	CAPAIAN (%)	ANALISIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)*100%	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/ Pemilihan Gubernur/ Bupati/Walikota yang Demokratis.	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu.	25	24	96	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Operasional dengan analisa bahwa dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran DPT berkelanjutan tepat waktu, sedang 5 (lima) KPU Kabupaten belum sepenuhnya karena masih dengan DPT Pemilu Tahun 2015.</li> <li>Definisi operasional dengan melakukan pemantauan progres inputan DPT berkelanjutan dalam aplikasi SIDALIH.</li> <li>Definisi Operasional dengan melakukan pembinaan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada.</li> <li>Melakukan koordinasi instansi terkait.</li> <li>Pengukuran disesuaikan dengan penyerapan TW 1 dan pelaksanaan kegiatan.</li> <li>Rekomendasi : Rakor Nasional dengan menghadirkan Kadis Dukcapil dalam rangka penyamaan persepsi.</li> <li>Tingkat bawah kesulitan mendapatkan data terbaru, disarankan melibatkan unsur Dukcapil (operator) dalam kegiatan pemutakhiran DPT.</li> </ul>

2	Terlaksananya Pemilu Legislatif dan Pilpres/ Pemilihan Gubernur/ Bupati/Walikota yang Aman, Damai Jujur dan Adil	Persentase dan Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya	10	10	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Operasional dengan analisa kurun TW I, penyelenggara bertugas sesuai dengan aturan yang berlaku.</li> <li>• Definisi Operasional dengan analisa Pilkada serentak Tahun 2017, yang sengketaan pada Bawaslu, PT.TUN, MK, semua dimenangkan oleh KPU.</li> </ul>
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota	Persentase Pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggara Pemilu dan Nilai Akuntabilitas Kinerja.	25	24	96	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Operasional pada kegiatan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Perbaikan laporan keuangan dan kinerja.</li> <li>• Pengukuran disesuaikan dengan penyerapan TW I dan pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
		Persentase Opini BPK atas LHP	70	60	85,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Operasional melakukan pemantauan tindak lanjut LHP BPK. Se Sulawesi Tengah dan penyusunan LK Semester II 2016 sesuai SAP.</li> <li>• Pengukuran disesuaikan dengan penyerapan TW I dan pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
		Indeks Reformasi Birokrasi	10	10	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional dengan telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi serta Tim agen perubahan.</li> <li>• Pengukuran disesuaikan dengan penyerapan TW 1 dan pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>

Palu, 3 April 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Lampiran 1 Surat Sekretaris Jenderal KPU RI

Nomor : 760/SJ/VII/2017

Tanggal : 6 Juli 2017

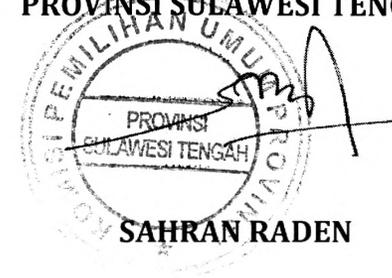
**TABEL PEMANTAUAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2017  
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (Bulan Januari s/d Maret)	CAPAIAN (%)	ANALISIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)*100%	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/ Pemilihan Gubernur/ Bupati/Walikota yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	25	24	96	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Operasional pada kegiatan ini dengan melihat bahwa masih terdapat KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terutama Kabupaten yang tidak melaksanakan Pilkada (lima Kabupaten)</li> <li>• Pengukuran disesuaikan dengan progres updating data SIDALIH secara berkelanjutan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota.</li> <li>• Rekomendasi : Agar KPU RI dapat mengalokasikan Tim Pokja terpadu tingkat bawah (operator Dukcapil).</li> </ul>
2	Terlaksananya Pemilu Legislatif dan Pilpres/ Pemilihan Gubernur/ Bupati/Walikota yang Aman, Damai Jujur dan Adil	Persentase Penyediaan dan Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Operasional : dengan analisa bahwa tingkat penyediaan informasi Pemilu dan hukum yang memadai.</li> <li>• Rekomendasi : agar KPU Kabupaten/Kota difasilitasi untuk pembentukan JDIIH yang <i>link</i> pula dengan KPU RI.</li> <li>• Pengukuran : Respon masyarakat terhadap informasi yang disajikan JDIIH dan pemanfaatannya.</li> </ul>

3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota	Persentase Pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggara Pemilu dan Nilai Akuntabilitas Kinerja.	25	24	96	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Operasional pada kegiatan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Persentase perbaikan pelaporan kinerja.</li> <li>Pengukuran disesuaikan dengan penyerapan TW II dan pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
		Persentase Opini BPK atas LHP	5	5	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi Operasional melakukan pemantauan tindak lanjut LHP BPK. Se Sulawesi Tengah dan persiapan penyusunan LK Semester I 2017 sesuai SAP.</li> <li>Pengukuran disesuaikan dengan penyerapan TW II dan pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
		Indeks Reformasi Birokrasi	40	39	97,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi operasional dengan pelaksanaan kegiatan yang konsisten dengan mekanisme kerja, mengedepankan efisiensi dan efektifitas sistem serta penguatan sistem manajemen SDM.</li> <li>Pengukuran disesuaikan dengan penyerapan TW II dan pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>

Palu, 3 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**SAHRAN RADEN**